

IMPLEMENTASI PADAT KARYA TUNAI DALAM MENURUNKAN PENDUDUK MISKIN DI PEDESAAN PROVINSI LAMPUNG DAN RIAU

Deni Herdiyana

Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN

APA Citation: Herdiyana, D. (2019). Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Prov. Lampung dan Riau. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 16(2), 176-188. DOI: 10.25134/equi.v16i02.

Abstract: Cash for Work in the Village (CfWV) is one of the Village Fund revitalization programs conducted to empower rural communities, especially the poor and marginal, who are productive by prioritizing the use of resources, labor, and local technology to provide additional income, reduce poverty, and improve people's welfare. This study aims to analyze the implementation of CfWV policies in Lampung and Riau Provinces. The method used is by conducting observations and interviews with stakeholders in the village which are categorized as Disadvantaged Villages or Very Disadvantaged Villages with a high number of poor people. In addition, a policy implementation approach which formulated by George C. Edward III was used to describe policy implementation variables, such as communication, resources, attitudes / dispositions, and bureaucratic structures. The findings of this study include: a tendency to decrease the spirit of mutual cooperation, the provision of a 30% minimum Working Day (HOK) Day is not fully suitable, and this program has not been able to permanently improve community welfare due to the temporary nature of its activities. Although this program is worth continuing, there needs to be some improvements, including the selection of activities that are more flexible in accordance with village needs and the expansion of community empowerment activities.

Keywords: cash for work, village funds, policy implementation

PENDAHULUAN

Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat ditujukan untuk membantu mengatasi permasalahan dalam pembangunan desa, yaitu ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang banyak terjadi di perdesaan. Dana Desa mulai dialokasikan dalam APBN pada Tahun Anggaran 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp20,7 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp46,98 triliun pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 126,24% dibandingkan dengan alokasi Dana Desa pada tahun 2015. Pada tahun 2017 alokasi Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun atau

meningkat 27,71% apabila dibandingkan dengan alokasi Dana Desa Tahun 2016, dan tetap dipertahankan pada tahun 2018. Dana Desa ini dialokasikan ke 74.954 desa dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp800 juta. Selanjutnya pada tahun 2019, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 70 triliun atau naik sebesar 16,67% dibandingkan tahun 2018.

Berdasarkan data BPS, pada Maret 2013 penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,33 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan tercatat sebanyak 17,74 juta jiwa. Angka

ini menurun pada Maret 2018 menjadi masing-masing sebesar 10,14 juta jiwa dan 15,81 juta jiwa. Artinya, terdapat penurunan penduduk miskin di perkotaan sebesar 1,79% dan di pedesaan sebesar

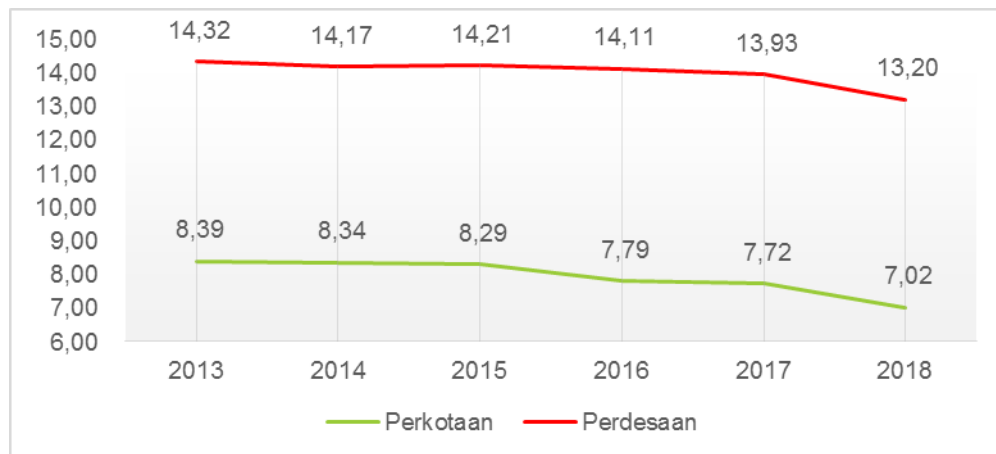
12,25%. Grafik berikut menunjukkan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan pada tahun 2013-2018 (juta jiwa).



Grafik 1 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2013-2018 (juta jiwa)

Berdasarkan grafik 2, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 8,39% sedangkan jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 14,32% pada Maret 2013. Angka ini menurun pada Maret 2018 menjadi masing-masing sebesar 7,02% dan

13,20% juta jiwa. Artinya, terdapat penurunan penduduk miskin di perkotaan sebesar 1,37% dan di pedesaan sebesar 1,12%. Grafik berikut menunjukkan persentase penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan pada tahun 2013-2018 (%).



Grafik 2. Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2013-2018 (%)

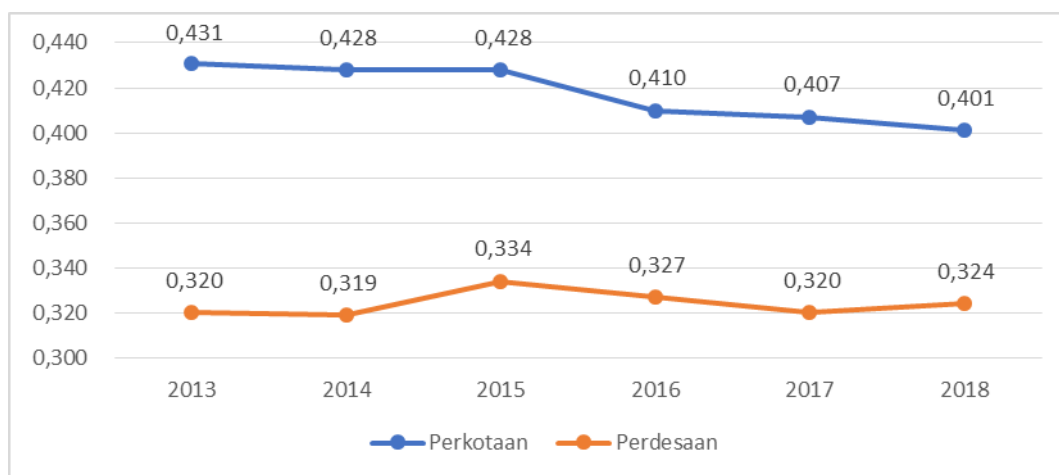
Namun demikian, terdapat kecenderungan jumlah dan persentase penduduk miskin di pedesaan terus

menurun, hal ini tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan penduduk. Distribusi pendapatan merupakan salah

satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena itu, data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan pendapatan yang bersumber dari data Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan koefisien Gini untuk mengukur

ketimpangan pengeluaran. Angka Gini yang semakin mendekati 1 (satu) menunjukkan semakin timpang.

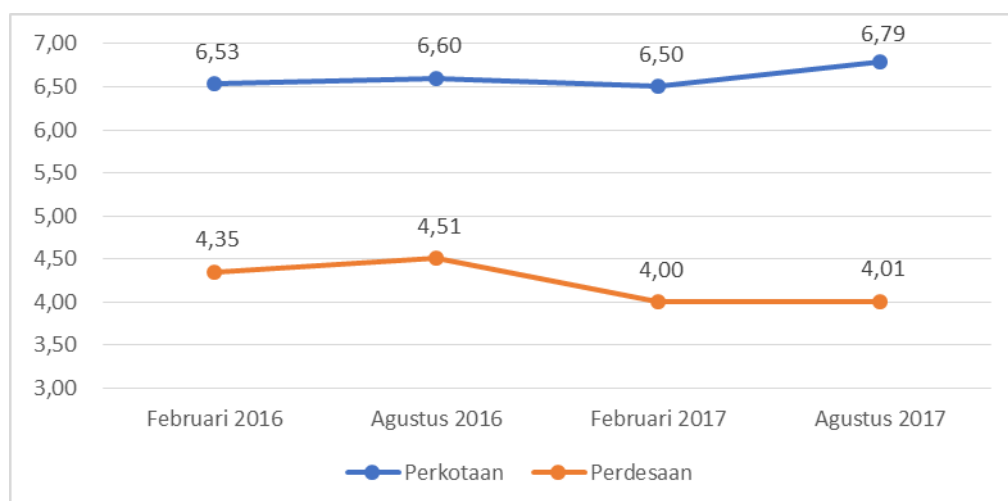
Rasio Gini di daerah perkotaan pada 2018 tercatat sebesar 0,401 turun dibanding rasio Gini tahun 2013 yang sebesar 0,431. Sementara itu, rasio Gini di daerah perdesaan pada 2018 tercatat sebesar 0,324, naik jika dibandingkan dengan rasio Gini 2013 yang sebesar 0,320. Data ini menunjukkan bahwa terdapat gejala meningkatnya ketimpangan di perdesaan.



Grafik 3. Rasio Gini Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2013-2018

Selain adanya kecenderungan ketimpangan pendapatan di perdesaan, terdapat pula indikasi meningkatnya

jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di perdesaan.



Grafik 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2016-2017 (%)

Berdasarkan fenomena tersebut, mencuat pertanyaan seberapa efektifkah Dana Desa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan di perdesaan. Dalam upaya mempercepat pemecahan masalah kemiskinan, kesenjangan dan masalah stunting di desa, mulai tahun 2018, Presiden menugaskan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) di seluruh desa. Khusus untuk penanganan masalah stunting akan diprioritaskan di 1.000 desa dalam 100 Kabupaten. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pelaksanaan PKTD ini merupakan refocusing penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait serta penggunaannya untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. Adapun upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah:

1. Apakah implementasi kebijakan Padat Karya Tunai di Desa sudah sesuai dengan prinsip diberlakukannya program tersebut?

2. Apakah implementasi kebijakan Padat Karya Tunai di Desa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan?

3. Apa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Padat Karya Tunai di Desa?

METODE PENELITIAN

a. Rancangan Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik survei dan diskusi/wawancara mendalam di daerah/desa sampel. Untuk tingkat kabupaten, diskusi/wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Dinas/aparatur DPMD Kabupaten dan pendamping desa tingkat kabupaten, dan untuk tingkat desa diskusi/wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Desa/aparatur desa, BPD, tenaga pendamping lokal desa dan tokoh masyarakat serta tenaga kerja penerima manfaat program PKT di desa. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, salah satu pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan mendalami permasalahan pada kasus tertentu, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisir, tetapi hanya berlaku pada tempat dimana kasus tersebut terjadi.

Selain itu untuk memperkaya studi lapangan, telah diedarkan kuesioner secara online. Instrumen dalam kuesioner mengacu pada variabel implementasi kebijakan berdasarkan pendekatan Edward III, terdiri dari 5 dimensi yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap/Disposisi, Struktur Birokrasi, dan Implementasi. Terdapat 19 butir pernyataan dimana responden diminta untuk menyatakan sikap terhadap pernyataan tersebut dalam skala 1 – 5. Tabel berikut menguraikan variabel, dimensi, dan instrumen kajian.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Kajian

Variabel	Indikator	Instrumen
Komunikasi	1. Pelaksanaan sosialisasi	1 s.d. 4
	2. Pemahaman setelah sosialisasi	
	3. Kelengkapan pedoman	
	4. Pemahaman	
Sumber Daya	1. Domisili objek	5 s.d. 8
	2. Kategori objek	
	3. Aparat	
	4. Petugas pendukung	
Sikap/Disposisi	1. Kesesuaian implementasi program dengan kesepakatan awal	9 s.d. 12
	2. Ada tidaknya insentif	
	3. Koordinasi antar pemangku kepentingan	
	4. Ketentuan insentif	
	5. Kerjasama	
Struktur Birokrasi	1. Pelaporan	13 s.d. 14
	2. Pengawasan	
Implementasi	1. Peningkatan pendapatan	15 s.d. 19
	2. Penurunan tingkat kemiskinan	
	3. Penurunan tingkat pengangguran	
	4. Kesesuaian dengan kebutuhan	
	5. Keberlanjutan program	

b. Lokasi dan Jenis Kajian

Kajian ini mengambil sampel di desa yang masuk kategori Desa Tertinggal (DT) atau Desa Sangat Tertinggal (DST) dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tinggi di wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Lampung, dan Provinsi Riau. Sebagai pembanding, terdapat desa yang tidak termasuk klasifikasi DT/DST tapi dengan JPM tinggi yang dikunjungi untuk melihat secara langsung implementasi program Padat Karya Tunai.

c. Sumber Data dan Informan

Sumber Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh di lapangan penelitian dan dari orang-orang yang dianggap representatif dan dipilih secara purposif sehingga bisa diperoleh data dan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Mereka yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kasi Pengelolaan Keuangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Camat beserta aparat;
2. Kepala Desa beserta perangkat desa;
3. Pendamping Desa;
4. Pendamping Lokal Desa;
5. Tim Pelaksana Kegiatan;
6. Tim Ahli; serta
7. Tokoh Masyarakat.

Sumber dan informan di atas dipilih dengan kriteria dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para tokoh dipilih karena dianggap ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan serta memperoleh dampak langsung proyek penggunaan Dana Desa.
2. Unsur Pemerintah Kabupaten dipilih karena mereka terlibat dalam

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penggunaan Dana Desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Kunjungan Lapangan Pedesaan di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota, meliputi 15 kabupaten dan 2 kota. Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 34.623,80 km² dengan populasi 8,29 juta jiwa (data tahun 2017). Di provinsi ini, terdapat 2.435 desa yang

tersebar di 13 kabupaten. Jumlah penduduk miskin pedesaan di Lampung pada tahun 2013 tercatat sebanyak 930 ribu jiwa (16,00%). Angka ini menurun menjadi 870 ribu jiwa (14,76 %) pada tahun 2018. Jumlah desa yang masuk kategori Desa Maju sebanyak 1 desa (0,04%), Desa Mandiri sebanyak 58 desa (2,38%), Desa Berkembang sebanyak 919 desa (37,74%), Desa Tertinggal sebanyak 1.306 desa (53,63%), dan Desa Sangat Tertinggal sebanyak 151 desa (6,20%).

Tabel 2. Sampel Desa Kunjungan di Lampung

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Neglasari	Katibung	Lampung Selatan
2	Podomoro	Pringsewu	Pringsewu

Desa Neglasari, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan

Desa Neglasari memiliki penduduk sebanyak 6.093 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.887 jiwa (30,97%). Desa ini termasuk Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi. Total Belanja pada APBDes Tahun 2018 sebesar Rp1.544.799.794,-. Pada tahun 2018 mendapatkan Dana Desa sebesar

Rp1.194.541.754,- dengan total nilai proyek yang bersumber dari Dana Desa untuk PKTD sebesar Rp835.703.257,- (69,96%). Total nilai upah yang dialokasikan dari nilai proyek sebesar Rp254.475.000,- (30,45%) dengan rata-rata upah sebesar Rp82.488,-/orang/hari. Tabel berikut menguraikan rekapitulasi proyek berdasarkan jenis kegiatan

Tabel 3. Rekapitulasi Proyek Berdasarkan Jenis Kegiatan di Desa Neglasari

Proyek	Nilai Proyek	Jumlah Upah	Rata-rata %HOK	Rata-rata Upah
Jalan/Jembatan	835.703.257	254.475.000	30,45%	82.488
Grand Total	835.703.257	254.475.000	30,45%	82.488

Di desa ini terdapat beberapa temuan, antara lain:

1. Alokasi desa berdasarkan prioritas desa yang ditetapkan dalam musdes.
2. Terdapat kecenderungan semangat gotong royong masyarakat sedikit berkurang setelah adanya program PKT.
3. Pilihan kegiatan yang terbatas untuk menunjang pemenuhan batas minimal 30% untuk upah tenaga kerja

4. Aparat desa terlalu mengandalkan Pendamping Lokal Desa untuk mengurus administrasi Dana Desa
6. Jumlah Tenaga Ahli masih kurang
7. Setidaknya terdapat 3 aplikasi yang harus dikuasai oleh Pemda/aparat desa, yaitu OM SPAN (Kemenkeu), SIPEDE (Kemendes PDTT), dan Siskeudes (BPKP). Ke depan, diharapkan ada integrasi aplikasi.
8. Terlalu banyak regulasi yang harus dipahami oleh aparat desa.

9. Prosedur pertanggungjawaban Dana Desa dirasa masih rumit

Desa Podomoro, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu

Desa Podomoro memiliki penduduk sebanyak 4.811 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 957 jiwa (19,897%). Desa ini termasuk Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi. Total Belanja pada APBDes Tahun 2018 sebesar

Rp1.630.572.691,-. Pada tahun 2018 mendapatkan Dana Desa sebesar Rp1.047.386.000,- dengan total nilai proyek yang bersumber dari Dana Desa untuk PKTD sebesar Rp982.543.000,- (93,81%). Total nilai upah yang dialokasikan dari nilai proyek sebesar Rp365.380.000,- (37,19%) dengan rata-rata upah sebesar Rp73.317,-/orang/hari. Tabel berikut menguraikan rekapitulasi proyek berdasarkan jenis kegiatan:

Tabel 4. Rekapitulasi Proyek Berdasarkan Jenis Kegiatan di Desa Podomoro

Proyek	Nilai Proyek	Jumlah Upah	Rata-rata %HOK	Rata-rata Upah
Irigasi	28.720.000	1.570.000	5,47%	74.762
Jalan/Jembatan	855.383.000	314.700.000	25,45%	72.367
Talud	98.440.000	49.110.000	49,89%	75.670
Grand Total	982.543.000	365.380.000	26,19%	73.317

Di desa ini terdapat beberapa temuan, antara lain:

1. Terdapat kecenderungan semangat gotong royong masyarakat sedikit berkurang setelah adanya program PKT.
2. Pilihan kegiatan yang terbatas untuk menunjang pemenuhan batas minimal 30% untuk upah tenaga kerja.
3. Data Indeks Desa Membangun belum diperbaharui sehingga terdapat desa yang sebenarnya sudah berkembang tapi masih dikategorikan sebagai desa tertinggal/desa sangat tertinggal.
4. Belum seluruh aparat desa memahami Siskeudes.
5. Aparat desa terlalu mengandalkan pendamping local desa untuk mengurus administrasi Dana Desa.
6. Jumlah tenaga ahli masih kurang.
7. Setidaknya terdapat 3 aplikasi yang harus dikuasai oleh Pemda/aparat desa, yaitu OM SPAN (Kemenkeu), SIPEDE (Kemendes PDTT), dan Siskeudes (BPKP). Ke depan, diharapkan ada integrasi aplikasi.

8. Terlalu banyak regulasi yang harus dipahami oleh aparat desa.
9. Prosedur pertanggungjawaban Dana Desa dirasa masih rumit.

Pedesaan di Provinsi Riau

Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota, meliputi 10 kabupaten dan 2 kota. Luas wilayah Riau adalah 87.023,66 km² dengan populasi 6,66 juta jiwa (data tahun 2017). Di provinsi ini, terdapat 1.592 desa yang tersebar di 10 kabupaten. Jumlah penduduk miskin pedesaan di Lampung pada tahun 2013 tercatat sebanyak 320 ribu jiwa (8,73%). Angka ini meningkat menjadi 330 ribu jiwa (8,09%) pada tahun 2018. Jumlah desa yang masuk kategori Desa Mandiri sebanyak 9 desa (0,57%), Desa Berkembang sebanyak 275 desa (17,27%), Desa Tertinggal sebanyak 885 desa (55,59%), dan Desa Sangat Tertinggal sebanyak 423 desa (26,57%). Di provinsi ini tidak terdapat desa dengan kategori Desa Maju.

Tabel 5. Sampel Desa Kunjungan di Riau

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Karya Indah	Tapung	Kampar
2	Rantau Baru	Pangkalan Kerinci	Pelalawan

Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar

Desa Karya Indah memiliki penduduk sebanyak 6.928 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 309 jiwa (4,46%). Desa ini termasuk Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi. Total Belanja pada APBDes Tahun 2018 sebesar Rp1.902.547.000,-. Pada tahun 2018 mendapatkan Dana Desa sebesar

Rp796.798.000,- dengan total nilai proyek yang bersumber dari Dana Desa untuk PKTD sebesar Rp691.650.200,- (86,80%). Total nilai upah yang dialokasikan dari nilai proyek sebesar Rp146.620.000,- (21,20%) dengan rata-rata upah sebesar Rp106.080,-/orang/hari. Tabel berikut menguraikan rekapitulasi proyek berdasarkan jenis kegiatan:

Tabel 6. Rekapitulasi Proyek Berdasarkan Jenis Kegiatan di Desa Karya Indah

Proyek	Nilai Proyek	Jumlah Upah	Rata-rata %HOK	Rata-rata Upah
Jalan/Jembatan	461.035.200	73.020.000	15,84%	103.574
Lainnya	124.114.000	41.520.000	33,45%	105.918
Sarpras Kesehatan	106.501.000	32.080.000	30,12%	108.746
Total	691.650.200	146.620.000	26,47%	106.080

Di desa ini terdapat beberapa temuan, antara lain:

1. Alokasi upah kerja di program PKT masih belum mencapai 30%, karena pada saat program PKT turun, APBDes sdh ditetapkan. Kami dan masyarakat berdasarkan musdes tidak merubah RAB dan tetap menggunakan RAB sesuai APBDes...
2. Persentase PKT di Desa Karya Indah rata2 26%.
3. Apabila PKT belum mencapai 30% apakah ada sanksinya.
4. Saat ini pengalokasian dana desa dibagi secara merata antar dusun, bukan perdasarkan prioritas desa. Sebaiknya alokasi dana desa berdasarkan prioritas kegiatan yang sudah disepakati dan ditetapkan dalam musdes.
5. Pendamping lokal desa belum maksimal, karena satu orang pendamping lokal desa membawahi 3 atau 4 desa. Perlu ada penambahan

jumlah personil pendamping lokal desa, sehingga setiap desa memiliki pendamping desa.

6. Penghasilan pendamping lokal desa belum mendapatkan penghasilan yang memadai, masih jauh dibawah UMR.
7. Penggunaan/pemakaian Tenaga kerja dalam rangka PKT dilakukan pendataan terlebih dahulu dari masing-masing RT dan pelaksanaan PKT dilakukan secara bergilir, sehingga semua tenaga kerja yang tidak bekerja di Desa memiliki bagian yang sama.
8. Usulan masyarakat (BPD):
 - a. Dana Desa utk proteksi kebakaran.
 - b. Apakah dana desa bisa digunakan utk membangun sarana ibadah.
 - c. Dana Desa dapat digunakan utk pendanaan bencana alam.
 - d. Dana Desa dapat digunakan utk dana bantuan sosial kepada masyarakat.

Desa Rantau Baru, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan

Desa Rantau Baru memiliki penduduk sebanyak 609 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 87 jiwa (14,29%). Desa ini termasuk Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi. Total Belanja pada APBDes Tahun 2018 sebesar Rp1.908.660.000,-. Pada tahun 2018 mendapatkan Dana Desa sebesar

Rp780.180.000,- dengan total nilai proyek yang bersumber dari Dana Desa untuk PKTD sebesar Rp592.680.000,- (75,97%). Total nilai upah yang dialokasikan dari nilai proyek sebesar Rp151.351.000,- (25,54%) dengan rata-rata upah sebesar Rp106.080,-/orang/hari. Tabel berikut menguraikan rekapitulasi proyek berdasarkan jenis kegiatan:

Tabel 7. Rekapitulasi Proyek Berdasarkan Jenis Kegiatan di Desa Rantau Baru

Proyek	Nilai Proyek	Jumlah Upah	Rata-rata %HOK	Rata-rata Upah
Air Bersih dan Sanitasi	82.000.000	23.333.000	28,45%	96.817
Jalan/Jembatan	180.000.000	31.134.000	17,30%	90.770
Sarpras Kesehatan	188.680.000	55.101.000	29,20%	99.821
Sarpras Olah Raga	142.000.000	41.783.000	29,42%	94.746
Total	592.680.000	151.351.000	26,09%	95.538

Di desa ini terdapat beberapa temuan, antara lain:

1. Program PKT muncul setelah APBDes ditetapkan sehingga menyebabkan perubahan RAB dan dengan adanya perubahan RAB maka mengorbankan kegiatan prioritas desa yaitu pembangunan jembatan penghubung desa dengan ibukota kabupaten, karena pembangunan jembatan menggunakan mesin traktor dan sedikit tenaga kerja manusia.
2. Upah yang ditetapkan dalam RAB terlalu kecil apabila dibandingkan dengan upah riel yang terjadi dilapangan (yang diterima masyarakat yang sebagian besar adalah pekerja dikebun karet dan kebun kelapa sawit), sehingga masyarakat menjadi enggan untuk ikut kegiatan PKT.
3. Solusi yang diberikan oleh kepala desa adalah pelaksanaan PKT dilaksanakan setelah penduduk/masyarakat melaksanakan kerja di kebun karet dan biasanya dilaksanakan pada malam hari.

4. Sulit mencari pekerja yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan PKT sehingga akhirnya kepala desa menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar desa.
5. Penggunaan tenaga kerja masyarakat lokal, sulit dilaksanakan pada daerah perkebunan. Karena upah kerja kecil dibandingkan upah kerja perkebunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Program PKT tidak dapat dilaksanakan terhadap pedesaan yang sudah mandiri dan maju. Hal ini dikarenakan fasilitas infrastruktur desa sudah tersedia dan memadai, sehingga tidak efektif apabila program PKT tetap dilaksanakan di desa mandiri dan maju tersebut.
2. Partisipan Program PKT belum sepenuhnya dapat mengakomodir masyarakat desa yang miskin, diantaranya terdapat masyarakat miskin yang sudah tidak bisa bekerja lagi (manula)/masyarakat miskin yang tidak

- memiliki kemampuan/keahlian untuk turut serta dalam program PKT.
3. Pemerintah Pusat/Daerah telah melakukan sosialisasi sebelum penerapan program PKT. Sosialisasi tersebut telah memberikan kejelasan program secara cukup yang disertai dengan pedoman yang lengkap. Namun di sebagian kecil desa sampel, terdapat keluhan akan minimnya pedoman teknis lanjutan terkait pelaksanaan PKT yang belum sesuai dengan kebutuhan.
 4. Masyarakat yang terlibat dalam program PKT ini adalah yang termasuk dalam kategori miskin, tidak bekerja, dan merupakan warga setempat. Namun di beberapa kasus, terdapat masyarakat yang tidak masuk kategori miskin tetapi ikut serta dalam program PKT dikarenakan adanya faktor 'kedekatan' dengan kepala desa/aparatur desa.
 5. Peran serta dari aparatur kecamatan terkait pelaksanaan program PKT belum dilakukan secara optimal. Di samping itu, beberapa data yang menjadi sumber informasi perumusan kebijakan (misal: Indeks Desa Membangun, jumlah penduduk miskin di pedesaan) belum diperbaharui sehingga bias dalam melihat kondisi/kategori desa.
 6. Pendamping Lokal Desa (PLD) telah berperan secara optimal dalam program PKT, meskipun terdapat beberapa kendala diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Domisili PLD yang jauh dari desa mengakibatkan terhambatnya mobilitas PLD dalam melaksanakan pendampingan ke desa tersebut,
 - b. Gaji/penghasilan PLD yang relatif kecil sehingga tidak mencukupi untuk biaya transportasi/operasional,
 - c. Di beberapa desa terdapat kecenderungan aparatur desa masih mengandalkan PLD untuk mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh aparatur desa.
 7. Meskipun pemilihan kegiatan sudah sesuai dengan hasil Musyawarah Desa (Musdes), namun hanya sebagian kecil anggota masyarakat yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan.
 8. Para pekerja penerima manfaat program PKT pada umumnya telah mendapatkan upah sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh daerah, namun di beberapa daerah yang memiliki biaya hidup tinggi upah tersebut relatif tidak mencukupi.
 9. Ketentuan Hari Orang Kerja (HOK) sebesar 30% kurang cocok bagi sebagian daerah, terutama bagi daerah yang:
 - a. memiliki infrastruktur yang relatif baik,
 - b. berkarakteristik perairan, atau
 - c. membutuhkan sarana/prasarana yang pembangunannya memerlukan keahlian khusus dan/atau alat berat (misal: pembangunan embung, jalan hotmix).
 10. Peran masyarakat dan aparatur dalam mengawasi pelaksanaan program PKT masih wajar dan tidak berlebihan. Namun di beberapa desa terdapat keluhan terhadap maraknya campur tangan yang tidak wajar dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan program ini.
 11. Program ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara permanen karena sifat kegiatannya yang temporer. Setelah kegiatan PKT selesai, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap akan kembali menganggur.
 12. Dampak pelaksanaan Program PKT secara ekonomi sudah terlihat secara langsung di beberapa desa sample, sebagai contoh pada saat partisipan penerima manfaat program PKT menerima upah/ gaji, langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Saran

1. Sebaiknya program PKT difokuskan pada desa yang masuk dalam kategori Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tinggi, karena kondisi infrastruktur di desa tersebut masih sangat terbatas dan masih memerlukan perbaikan serta tambahan infrastruktur. Sedangkan untuk desa mandiri/maju, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sebaiknya lebih difokuskan untuk kegiatan/program mengenai pemberdayaan masyarakat desa.
2. Perlu diberikan bantuan dalam bentuk pemberian uang tunai secara langsung yang bersumber dari Dana Desa bagi masyarakat miskin yang tidak dapat ikut serta dalam pelaksanaan program PKT, seperti halnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dulu pernah ada pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono.
3. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif oleh Pemda kabupaten/kota serta perlu adanya penetapan pedoman teknis lanjutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melengkapi pedoman umum Program PKT yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4. Untuk menjaga pelaksanaan PKT yang transparan dan tepat sasaran, perlu adanya monitoring, evaluasi dan pengawasan dari masyarakat setempat dan Inspektorat Daerah Kabupaten setempat.
5. Perlu adanya peran serta dari aparatur kecamatan dalam pelaksanaan program PKT yang lebih intensif.
6. Perlu adanya pemutakhiran database terkait data IDM dan jumlah penduduk miskin di perdesaan agar lebih akurat dan valid dalam pemetaan kondisi/kategori desa.
7. Terkait kendala yang dihadapi oleh PLD, penulis merekomendasikan sebagai berikut:
 - a. Perlu dilihat kembali terkait penempatan PLD dengan memperhatikan domisili (desa asal) PLD yang bersangkutan.
 - b. Perlu adanya dana operasional untuk transportasi agar mempermudah akses bagi PLD ke desa-desa terpencil.
 - c. Perlu adanya peningkatan kapasitas kepala desa/aparatur desa melalui pelatihan dan bimtek terkait pengelolaan keuangan desa.
8. Perlu adanya keterlibatan masyarakat secara holistik dalam Musdes agar tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam pelaksanaan kegiatan Program PKT.
9. Perlu ditinjau kembali dan penyesuaian Standar Biaya Daerah (SBD) untuk membayar partisipan Program PKT agar sesuai dengan upah riil yang berlaku di daerah tersebut.
10. Sebaiknya ketentuan mengenai HOK sebesar 30% agar tidak rigid, agar ketentuan 30% tersebut dapat dikecualikan bagi desa-desa yang sudah memiliki infrastruktur yang relatif baik, berkarakteristik perairan, dan desa-desa yang membutuhkan sarana/prasarana yang pembangunannya memerlukan keahlian khusus dan/atau alat berat (misal: pembangunan embung, jalan hotmix).
11. Perlu peran aktif dari babinsa dan bhabinkamtibmas dalam mengatasi maraknya campur tangan yang tidak wajar dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan program PKT.
12. Perlu adanya pengalihan program PKT yang sampai saat ini fokus pada pembangunan sarana dan prasarana desa menjadi program pemberdayaan masyarakat desa. Dengan program pemberdayaan masyarakat desa maka

masyarakat akan dibekali dan dilatih dengan berbagai keahlian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuannya sehingga nantinya dapat membuka usaha sendiri dan bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lainnya sehingga pengangguran di desa dapat dikurangi dan masyarakat desa memiliki mata pencaharian secara berkesinambungan.

13. Program PKT perlu ditindaklanjuti dan dilaksanakan pada tahun berikutnya, namun dengan catatan perlu adanya perbaikan dalam tahap implementasi program PKT. Untuk itu, perlu mendorong Kementerian Desa dan PDTT untuk mempertajaman kebijakan prioritas penggunaan dana desa agar lebih dapat

memberdayakan masyarakat desa dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan.

PENGHARGAAN

(ACKNOWLEDGEMENT)

Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua, ibu mertua, istri dan anak saya yang selalu memberikan motivasi baik moril maupun materil. Saya juga ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya di Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Dit. PTNDP (DJPK) khususnya kepada Bapak Nasrullah dan Kang Rizky Muliawan yang telah bekerjasama dan memberikan ide cemerlangnya sehingga kajian ini dapat tersusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka*. Bandung: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Lampung dalam Angka*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Riau dalam Angka*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik.
- Barrientos, A., & DeJong, J. (2004). *Child Poverty and Cash Transfers (Childhood Poverty Research and Policy Centre Report No. 4)*. London: Save the Children.
- Department for International Development (DFID). (2005). *Social Transfers and Chronic Poverty: Emerging Evidence and the Challenge Ahead. A DFID Practice Paper*. London: Department for International Development (DFID).
- Doocy, S., Gabriel, M., Collins, S., & Robinson, C. (2006). *Implementing Cash for Work Programmes in Post-Tsunami Aceh: Experiences and Lessons Learned. Disasters*, 30(3), 277-293.
- Guluma, Y. (2004). *Studies on Alternatives to Food Aid: Case Study DRC: Cash for Work Projects*. London: Save the Children.
- Handa, S., & Davis, B. (2006). *The Experience of Conditional Cash Transfers in Latin America and the Caribbean*. *Development Policy Review*, 24(5), 513-536.
- Harvey, P. (2005). *Cash and Vouchers in Emergencies. Humanitarian Policy Group Discussion Paper*. London: Overseas Development Institute.
- Kakwani, N., Soares, F., & Son, S. (2005). *Conditional Cash Transfers in African Countries: UNDP Research Project Report*. New York: United Nations Development Programme (UNDP).
- Lothike, E. (2005). *Cash for Work in Emergencies: Turkana 2001 and 2003. Cash: A New Currency for Emergency Interventions? Lessons from Recent Experience in Nairobi, Kenya*.
- Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Keputusan Bersama tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.
- Nagamatsu, S. (2013). *Are Cash for Work (CfW) Programs Effective to Promote Disaster Recovery? Evidence from the Case of Fukushima Prefecture*. *Journal of Disaster Research*, 9(2).
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Slater, R., & Farrington, J. (2006). *Introduction: Cash Transfers: Panacea for Poverty Reduction or Money Down the Drain? Development Policy Review*, 24(5), 499-511.